



Kementerian Agama RI
Balai Diklat Keagamaan Palembang



LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI BDK PALEMBANG TAHUN 2024



www.bdkpalembang.kemenag.go.id
[balaidiklatkeagamaanplg](#)

FOLLOW US!

Balai Diklat Keagamaan Palembang
 eLTV bdkeagamaan_plg



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : pZfj9X

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG

Disahkan Tanggal: 30 Desember 2024

Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang

^

Dr. H. Saefudin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197501052003121002



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena atas limpahan karunia, hidayah serta *inayah*-Nya, Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Palembang ini dapat rampung. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran umum bagi para pembaca tentang persepsi peserta pelatihan di BDK Palembang tentang ada-tidaknya praktik korupsi di lingkungan pelatihan yang diselenggarakan BDK Palembang. Laporan ini diharapkan akan menjadi pedoman BDK Palembang dalam memperbaiki kinerjanya di masa mendatang, *wabil khusus* dalam menjauhkan birokrasi dan pelayanan BDK Palembang dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi BDK Palembang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei, penyusunan laporan, hingga publikasi laporan ini. Kami mengharapkan timbal balik dari berbagai pihak yang terlibat sebagai *stakeholder* kami, terutama para alumni pelatihan, baik dalam bentuk saran maupun kritik konstruktif, agar kami dapat membenahi BDK Palembang menjadi lembaga pelatihan yang bebas dari korupsi serta bersih melayani. *Akhirul kalam*, semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 30 Desember 2024

Tim Pelaksana



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Balai Diklat Keagamaan (BDK) Palembang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah tersusunnya indeks persepsi anti korupsi yang sekaligus menjadi parameter pemerintah yang bersih dan melayani.

Balai Diklat Keagamaan Palembang merupakan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kementerian Agama yang dibawah langsung oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan pelatihan di wilayah kerjanya, antara lain meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 15 tahun 2021, tugas Balai Diklat Keagamaan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi serta pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Pelatihan yang diselenggarakan terdiri dari pelatihan sebelum pegawai menduduki jabatan, yaitu pelatihan dasar/latsar, pelatihan dalam jabatan, serta pelatihan kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, peran BDK Palembang senantiasa terkait dengan aktivitas pelayanan kepada peserta pelatihan. Diharapkan pelayanan yang diberikan adalah pelayanan publik yang bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Demi terwujudnya pelayanan pelatihan yang bebas dari korupsi, BDK Palembang menyelenggarakan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap BDK Palembang. Persepsi yang baik dari peserta diklat akan ditunjukkan dari tingginya perolehan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Sebaliknya, IPAK yang rendah menunjukkan kurang pedulinya lembaga terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Perolehan IPAK tersebut selanjutnya bisa dijadikan dasar dalam penerapan kebijakan terkait pelayanan yang bebas dari korupsi.



1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, maksud dan tujuan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dari pengguna layanan pelatihan di BDK Palembang. Selain itu, survei juga bertujuan untuk mendapatkan referensi yang valid dalam menetapkan kebijakan, menjadi acuan peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan, serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi diharapkan dapat menjadi data dukung yang membantu BDK Palembang dalam menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN

Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi di BDK Palembang dilakukan dalam kurun waktu Bulan Januari hingga Desember Tahun 2024 dengan melibatkan peserta yang mengikuti pelatihan selama kurun waktu tersebut.

1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan pelatihan di BDK Palembang.



BAB II

METODE PENGUKURAN

2.1. POPULASI DAN SAMPEL

Dalam kegiatan ini, yang menjadi populasi adalah seluruh peserta pelatihan reguler, Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK), Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), Pelatihan Kerjasama (PKS), Pelatihan Dasar (Latsar) serta Orientasi P3K yang diselenggarakan BDK Palembang di sepanjang tahun 2024. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *voluntary response sampling* yaitu penentuan sampel yang terdiri dari *self-chosen respondent*. Dalam arti lain, para responden secara sukarela mengambil bagian dalam studi penelitian untuk berbagi pendapat mereka tentang topik yang sedang dibahas. Teknik ini dipilih atas pertimbangan kemudahan dan efisiensi waktu.

Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan metode pengumpulan data berupa survei secara daring via *Google Form* dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif.

2.2. WAKTU DAN TEMPAT

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh BDK Palembang dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan sejak Januari hingga Desember 2024. Survei dilaksanakan secara daring. Responden menjawab pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner *Google Form* yang dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://bit.ly/SurveiIPAK-IPKP-BDKPlg-2024>

2.3. RESPONDEN

Kriteria untuk responden Survei Persepsi Anti Korupsi adalah peserta Pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang selama Bulan Januari hingga November 2024. Untuk menghindari bias, responden yang dipilih ialah mereka yang sedang melakukan atau yang telah melakukan pelatihan dalam waktu referensi survei berlangsung.

2.4. KUESIONER

Kuesioner dipilih sebagai alat bantu pengumpulan data guna menyusun Indeks Persepsi Anti Korupsi. Unsur yang dipakai untuk mengukur persepsi peserta pelatihan dalam survei ini sebanyak 8 unsur yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban berskala ordinal, yaitu “sangat tidak setuju”, “tidak setuju”, “setuju”, dan “sangat setuju” dengan skor untuk masing-masing jawaban dari angka 1,2,3, dan 4. Ke-8 unsur tersebut antara lain:

- 1) Manipulasi Peraturan; Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
- 2) Penyalahgunaan Jabatan; Apakah dalam memperoleh layanan secara cepat terdapat petugas pelayanan yang menyalahgunakan jabatan untuk meminta imbalan tertentu?
- 3) Menjual Pengaruh; Adakah pegawai BDK Palembang yang menghubungi secara pribadi dan menawarkan bantuan dalam pengutusan surat/berkas?
- 4) Hadiah; Apakah Anda memberikan tanda terima kasih material kepada BDK Palembang atas layanan yang diterima?
- 5) Transparansi Informasi; Apakah selalu mudah memperoleh informasi tentang prosedur pelayanan melalui media sosial/website BDK Palembang?
- 6) Transparansi Biaya; Apakah Anda membayar tarif tidak resmi untuk bisa memperoleh pelayanan?
- 7) Pencaloan; Apakah terdapat praktik percaloan dalam pengurusan layanan?
- 8) Praktik KKN; Apakah Anda pernah mendengar atau menyaksikan praktik KKN di BDK Palembang?



2.5. NILAI PERSEPSI

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Nilai penimbang setiap unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat sama dengan menggunakan rumus :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai tertimbang

Untuk memperoleh nilai SPAK digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus :

$$\text{SPAK} = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai tertimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus :

$$\text{SPAK Unit layanan} \times 25$$

Penilaian persepsi sangat penting dalam mengukur hasil pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi. Nilai persepsi dibagi ke dalam angka 1, 2, 3 dan 4, yang masing-masingnya merepresentasikan nilai bersih atau tidaknya instansi tersebut dari korupsi. Penjelasan lebih detail tentang nilai persepsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

Nilai persepsi 1 merepresentasikan instansi yang tidak bersih dari korupsi, dengan nilai interval antara 1,00 - 1,75; nilai persepsi 2 dengan nilai interval 1,76 - 2,50 mencirikan instansi masih kurang bersih dari korupsi; nilai persepsi 3 dengan nilai interval 2,51 - 3,15 menunjukkan instansi sudah cukup bersih dari korupsi; serta nilai persepsi 4 mengindikasikan instansi sudah bersih dari korupsi, ditunjukkan dengan nilai interval 3,26 - 4,00.

Nilai interval dapat dikonversi ke dalam skala 100. Semakin tinggi nilai interval, semakin tinggi nilai konversinya, maka semakin bersih pula layanan instansi dari korupsi.

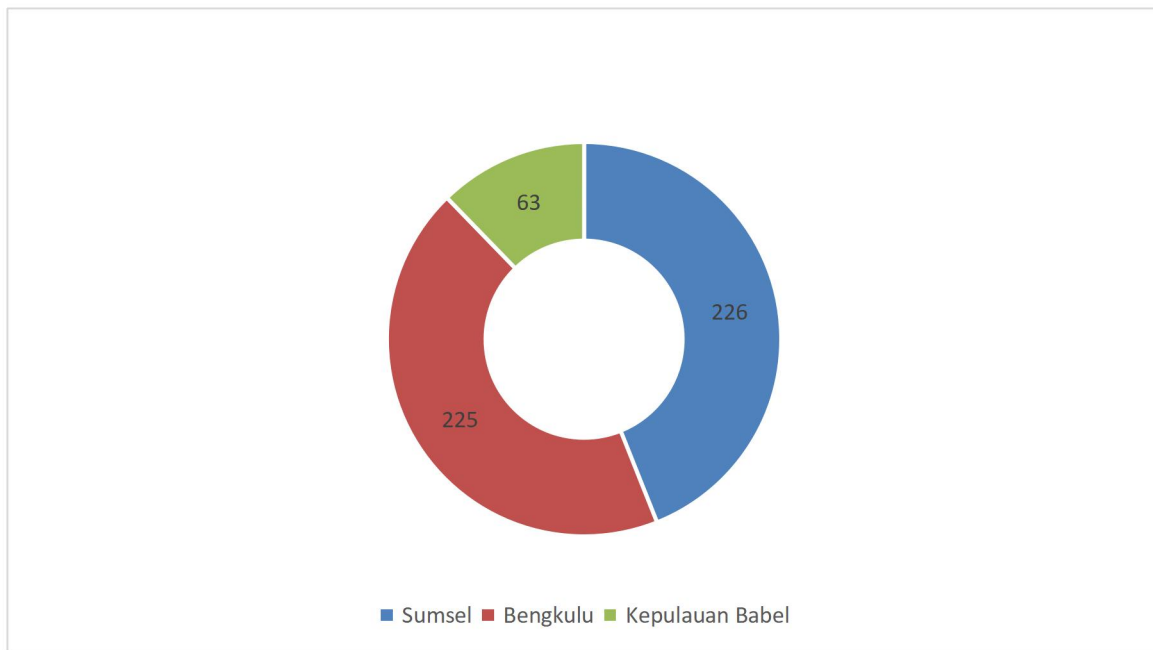
BAB III

HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. PROFIL RESPONDEN

Sepanjang Tahun 2024, BDK Palembang telah melaksanakan 164 angkatan pelatihan, di antaranya Pelatihan Administrasi (4 angkatan Latsar CPNS, 29 angkatan Orientasi PPPK, Pelatihan Adm 13 Angkatan), 57 angkatan pelatihan teknis pendidikan, serta 26 angkatan pelatihan teknis keagamaan. Total jumlah alumni yang dicetak BDK Palembang pada tahun 2024 adalah sebanyak 4.922 orang. Pelatihan-pelatihan ini dilaksanakan dalam pola tatap muka melalui pelatihan reguler, PDWK dan PKS, dilakukan dengan pola campuran atau *blended learning* dilakukan pada Orientasi PPPK, sertadilaksanakan secara daring ada PJJ.

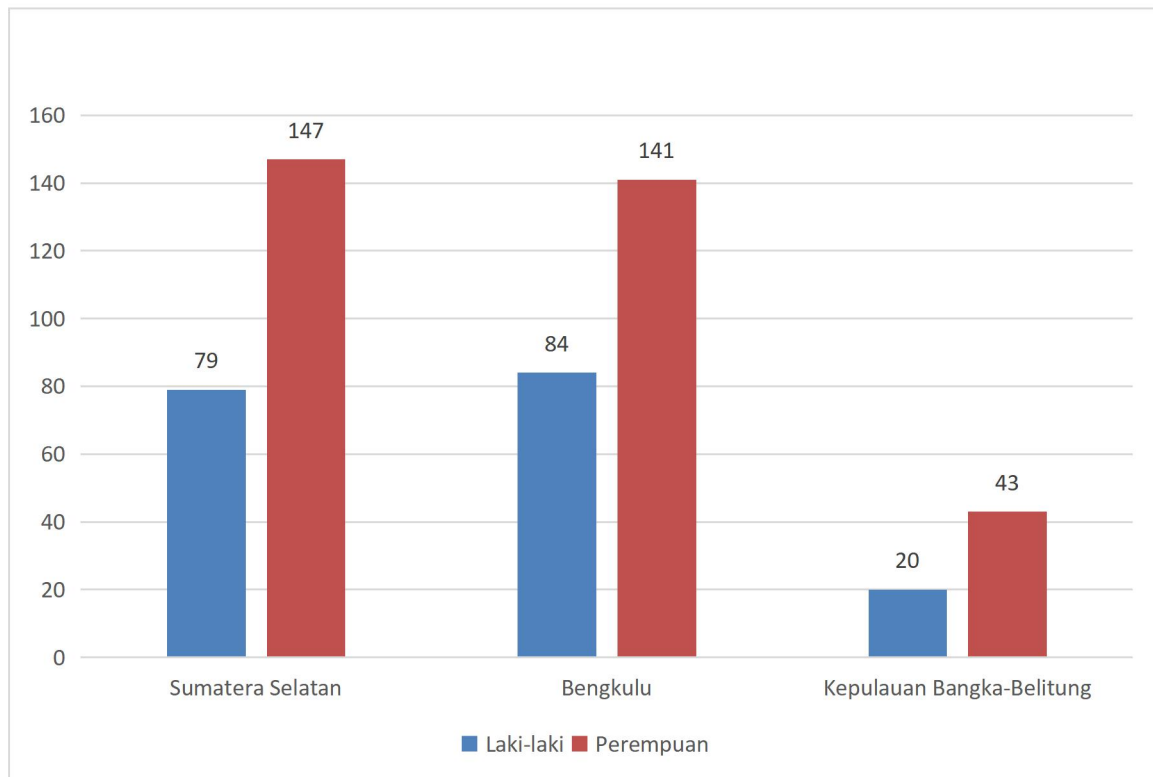
Selama periode survei, dari total jumlah populasi, sebanyak 514 orang responden telah berpartisipasi dalam Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi yang diadakan oleh BDK Palembang. Mereka merupakan akumulasi jumlah total alumni pelatihan yang berpartisipasi pada setiap survei di setiap triwulan di sepanjang 2024.



Gambar 3.1. Diagram Jumlah Sampel Berdasarkan Provinsi Asal

Dari diagram di atas dapat dilihat jika responden survei ini didominasi oleh alumni pelatihan yang bertugas di satker Kemenag di Provinsi Sumsel sebanyak 226 orang (43,96%), disusul oleh sampel asal Provinsi Bengkulu sebanyak 225 orang (43,77%) dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 33 orang (12,25%).

Selain itu, komposisi peserta pelatihan berdasarkan jenis kelamin dan tempat asalnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 3.2. Diagram Jumlah Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin per Provinsi

Secara umum, responden dalam survei ini didominasi oleh perempuan. Responden dari Provinsi Sumsel terdiri oleh 79 orang responden laki-laki dan 147 responden perempuan; responden dari Provinsi Bengkulu terdiri dari 84 orang laki-laki dan 141 orang perempuan; sementara responden dari Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung terdiri dari 20 orang laki-laki dan 43 orang Perempuan.

3.2. ANALISIS HASIL PERHITUNGAN IPAK

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 8 unsur pertanyaan yang dinilai dalam SPAK. Uraian di bawah ini menjelaskan hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi per masing-masing unsur pernyataan.

Berdasarkan hasil analisis data hasil survei maka Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Palembang sebesar 81,63 % yang berada pada kategori “A” (pada interval 88,31-100,00). Sementara Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,95 dengan kategori persepsi korupsi “A” artinya “Bebas dari Korupsi”.

Tabel 3.1

Rata-rata skor dan peringkat pada setiap item/indikator pengukuran indeks persepsi korupsi layanan Balai Diklat Keagamaan Palembang

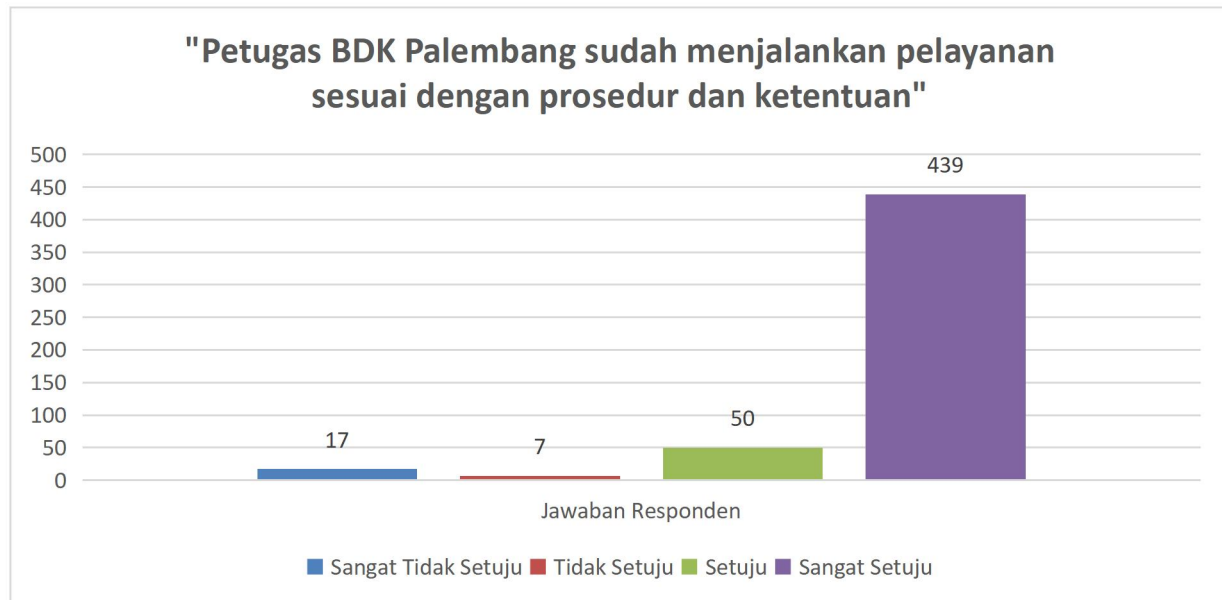
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	3,78	Bersih dari Korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,56	Bersih dari Korupsi
3	Menjual Pengaruh	3,67	Bersih dari Korupsi
4	Transaksi Biaya	3,70	Bersih dari Korupsi
5	Biaya Tambahan	3,73	Bersih dari Korupsi
6	Hadiah	3,61	Bersih dari Korupsi
7	Transparansi Biaya	3,71	Bersih dari Korupsi
8	Percaloan	3,69	Bersih dari Korupsi

Hasil di atas, terdiri dari akumulasi penilaian pada delapan unsur indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-masing ke delapan unsur item/indikator yakni sebagai berikut :

a. Manipulasi Peraturan

Unsur ini tertuang ke dalam pertanyaan “Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?” Dari total 514 responden dan Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,78** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Manipulasi Peraturan.

Komposisi jawaban reponden dalam bentuk diagram dapat dilihat di bawah ini:



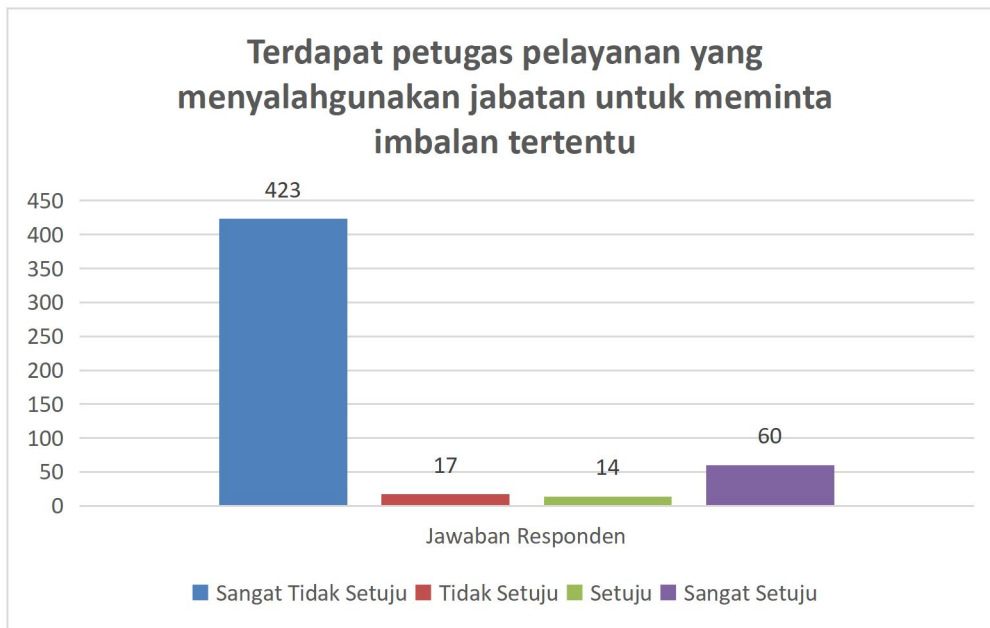
Gambar 3.3. Diagram Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

b. Penyalahgunaan Jabatan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,56** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Penyalahgunaan jabatan.

Meski demikian, masih terdapat 14 orang yang mengisi “sangat setuju” dan 60 orang yang memilih “sangat setuju”. Hasil ini kemungkinan diperoleh karena terjadi bias antara pertanyaan pada kuesioner dengan pilihan jawabannya, sehingga peserta salah memilih pernyataan, atau bisa juga terjadi karena memang peserta pernah mengalami intervensi oleh pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini menjadi bahan evaluasi BDK Palembang untuk ke depannya dalam menyelenggarakan Survei IPAK maupun dalam menyelenggarakan pelayanan pelatihan.

Rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan ini dapat dilihat dalam bentuk grafik di bawah ini:



Gambar 3.4. Diagram Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

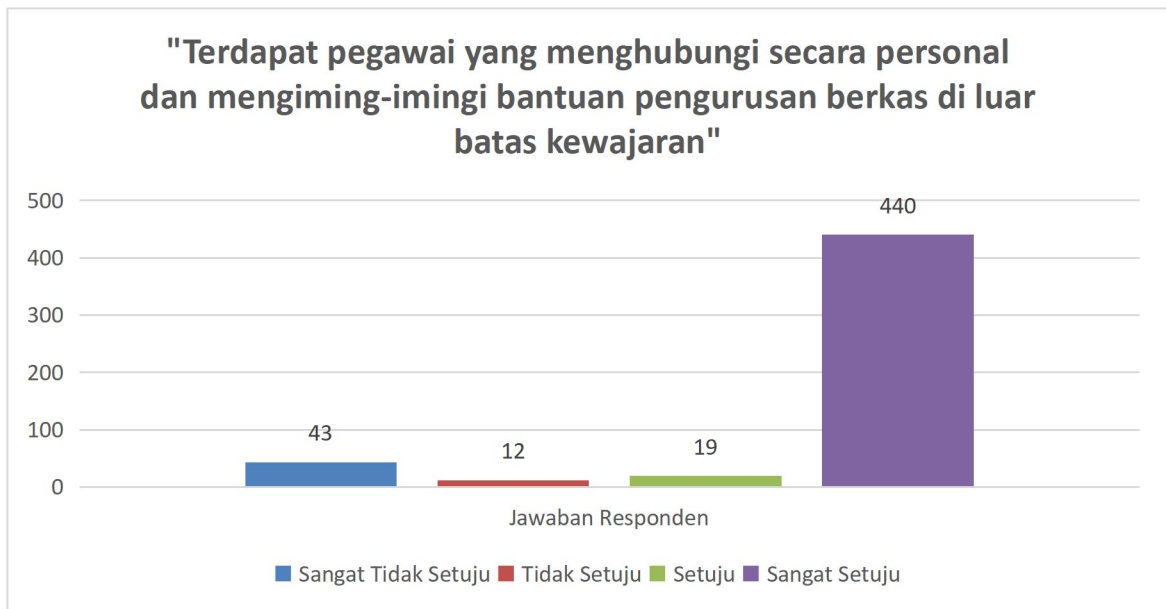
c. Menjual Pengaruh

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,56** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Menjual Pengaruh.

Dari total 514 responden, sebanyak 440 orang di antaranya menyatakan “sangat setuju” untuk pernyataan “tidak pernah dihubungi secara pribadi oleh pegawai BDK Palembang untuk membantu pengurusan berkas tertentu”. 19 orang lagi mengatakan “Setuju” untuk pertanyaan tersebut.

Sebanyak 12 orang menyatakan “tidak setuju”, dan sebanyak 43 orang menjawab “sangat tidak setuju”. Hal ini bisa jadi mengindikasikan jika ada pegawai BDK Palembang yang menjual pengaruh dalam penyelenggaraan pelatihan. Di sisi lain, banyaknya pilihan ini kemungkinan dikarenakan responden menyalahartikan “dihubungi untuk pengurusan berkas” sebagai bantuan yang diberikan oleh penyelenggara pelatihan sesuai prosedur, bukan bantuan yang menjurus ke arah KKN. Lebih lanjut, baik peserta maupun panitia pelatihan perlu diedukasi lebih baik tentang jenis bantuan mana saja yang boleh diminta lewat kontak pribadi serta mana yang tidak.

Komposisi hasil jawaban dalam bentuk grafik dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 3.5. Diagram Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

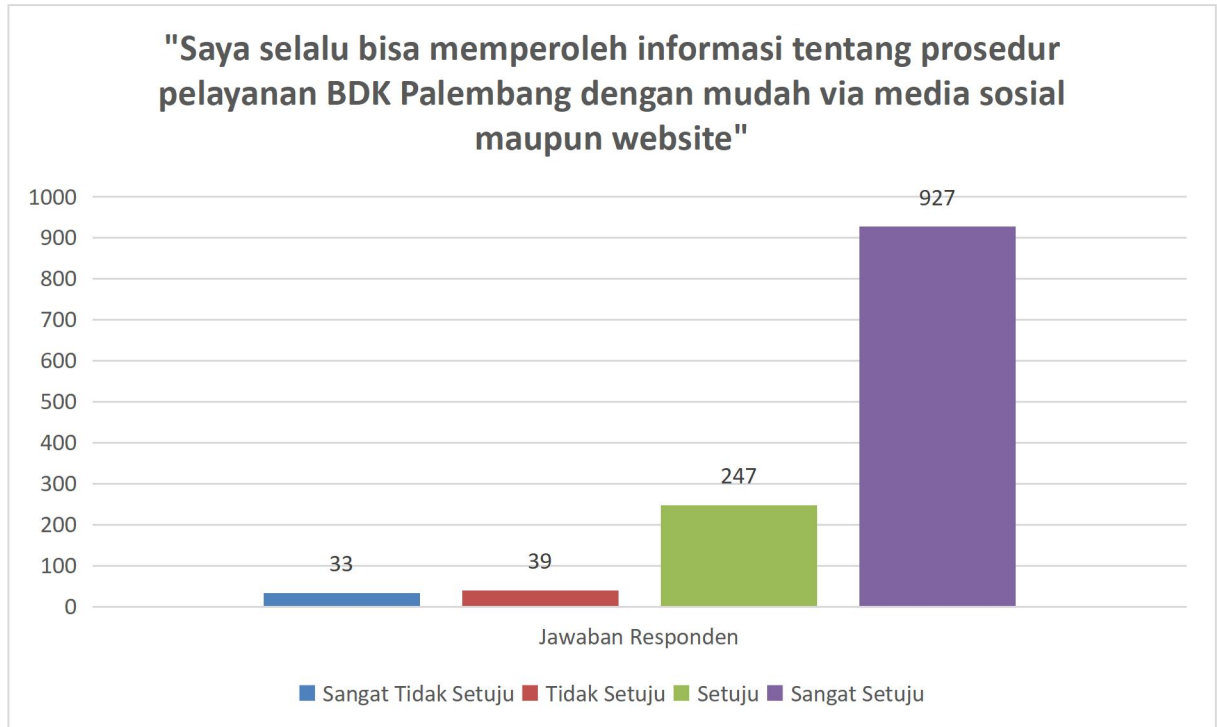
d. Transparansi Informasi

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,70** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Transparansi Informasi.

Persepsi untuk unsur ini diukur melalui pertanyaan, “Apakah selalu mudah memperoleh informasi tentang prosedur pelayanan melalui media sosial/website BDK Palembang?”. Sebanyak 401 orang responden menyatakan “sangat setuju”, 83 responden lainnya mengatakan “setuju”. Jawaban tersebut berarti peserta dapat memperoleh informasi terkait kepelatihan dengan mudah via kanal media sosial dan website BDK Palembang. Hal ini mengindikasikan jika inovasi yang dilakukan BDK Palembang di bidang kehumasan dan informasi sudah dapat mendorong transparansi informasi bagi *stakeholder* BDK Palembang.

Meski demikian, masih terdapat 13 orang responden yang menjawab “tidak setuju” dan 15 orang responden yang menjawab “sangat tidak setuju”. Selain itu, ada 1 responden yang tidak memberikan jawaban pada unsur ini. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi BDK Palembang dalam mengelola kanal media sosial dan website, agar pelayanan yang diberikan BDK Palembang dapat menjadi lebih berkualitas dan menjangkau lebih banyak pihak serta mengindikasikan jika pengguna pelatihan masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi seputar kediklatan.

Ikhtisar jawaban responden untuk unsur ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



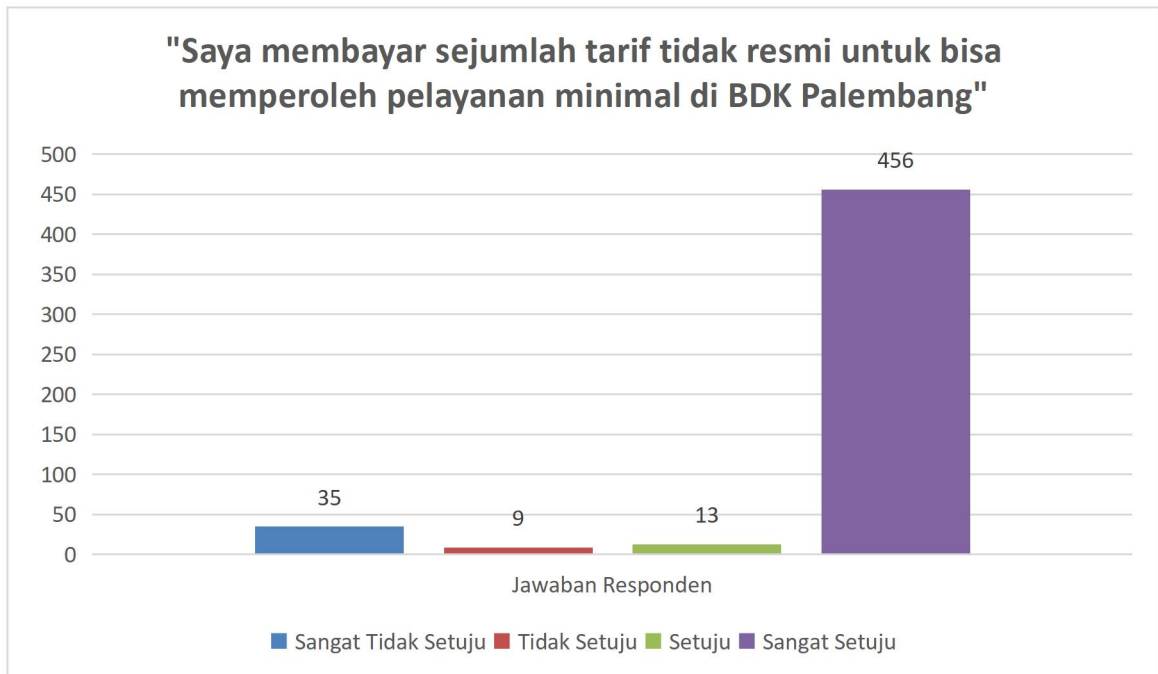
Gambar 3.6. Diagram Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Informasi

e. Transparansi Biaya

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,73** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Transparansi Biaya.

BDK Palembang menerapkan kebijakan nol biaya bagi semua peserta pelatihan, baik pelatihan reguler maupun PDWK. Bahkan uang harian dan ongkos perjalanan pulang-pergi peserta dari domisili masing-masing ke lokasi pelatihan juga diakomodir oleh BDK Palembang sesuai dengan SBM dan ketentuan yang berlaku. Informasi tentang pembiayaan ini idealnya diberikan secara transparan kepada para peserta sebelum mereka menerima pembayaran pada akhir pelatihan.

Detilnya setiap jawaban dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



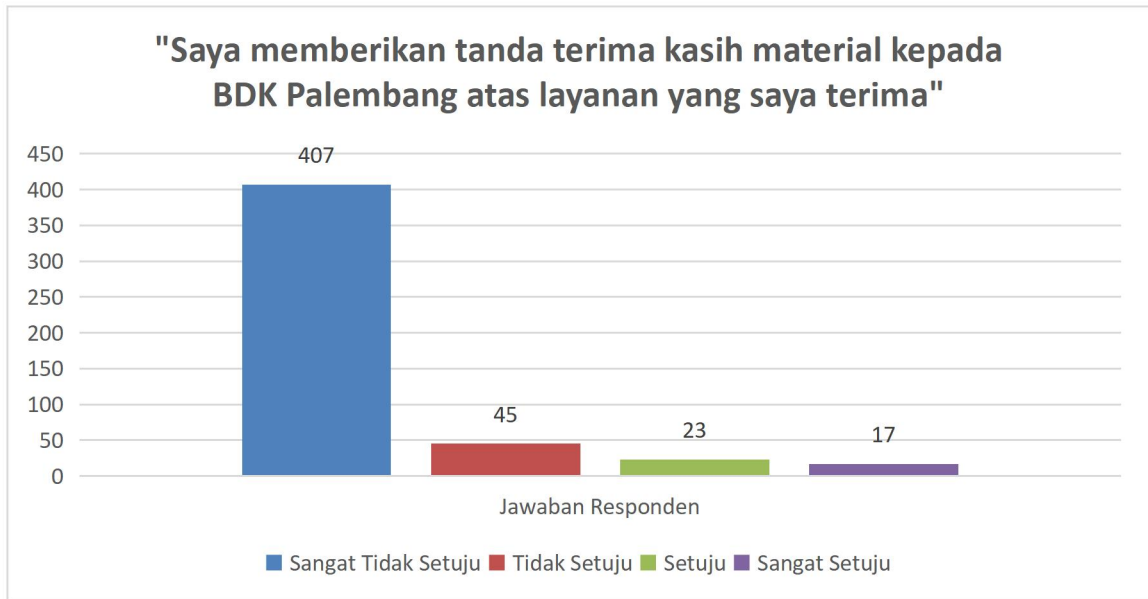
Gambar 3.7. Diagram Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

f. Hadiah

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,61** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Transparansi Biaya.

Praktik pemberian hadiah memang masih kerap terjadi dalam pelaksanaan pelatihan. Peserta pelatihan biasanya mengartikan pemberian hadiah sebagai bentuk tanda terima kasih kepada panitia pelatihan yang telah menyelenggarakan pelatihan untuk mereka, dan kebiasaan tersebut bertahan karena tidak semua panitia pelatihan di BDK Palembang menyosialisasikan kebijakan anti gratifikasi kepada peserta. BDK Palembang perlu melakukan edukasi lebih, baik kepada *stakeholder*-nya maupun kepada jajaran internalnya di masa mendatang, agar budaya pemberian hadiah dapat dikurangi, atau bahkan dihilangkan.

Detil jawaban responden dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

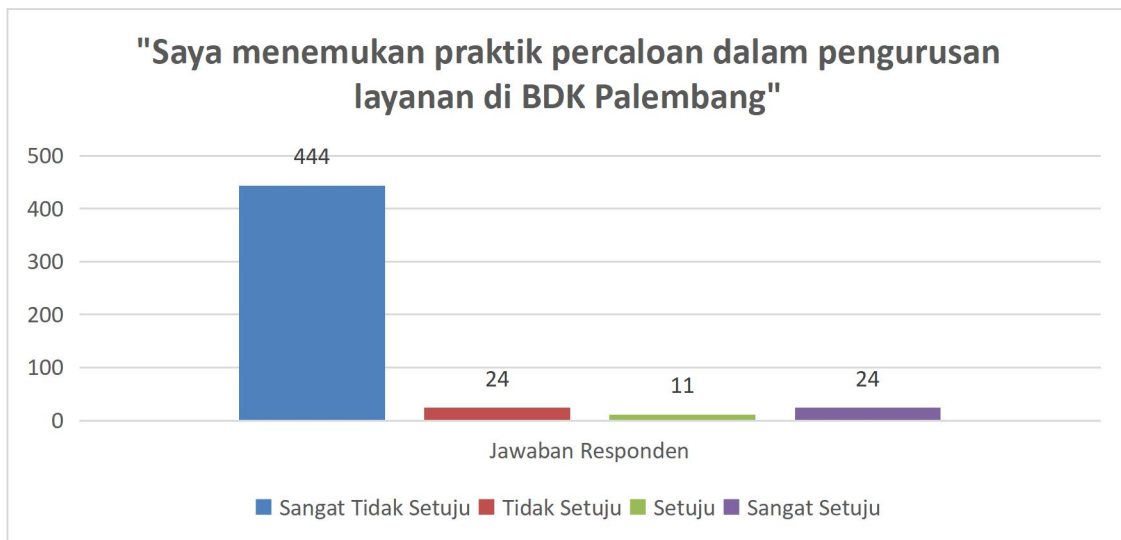


Gambar 3.8. Grafik Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

g. Percaloan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,71** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Pencaloan.

Unsur ini tertuang dalam pertanyaan “Apakah terdapat praktik percaloan dalam pengurusan layanan?”. Detil jawaban responden dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

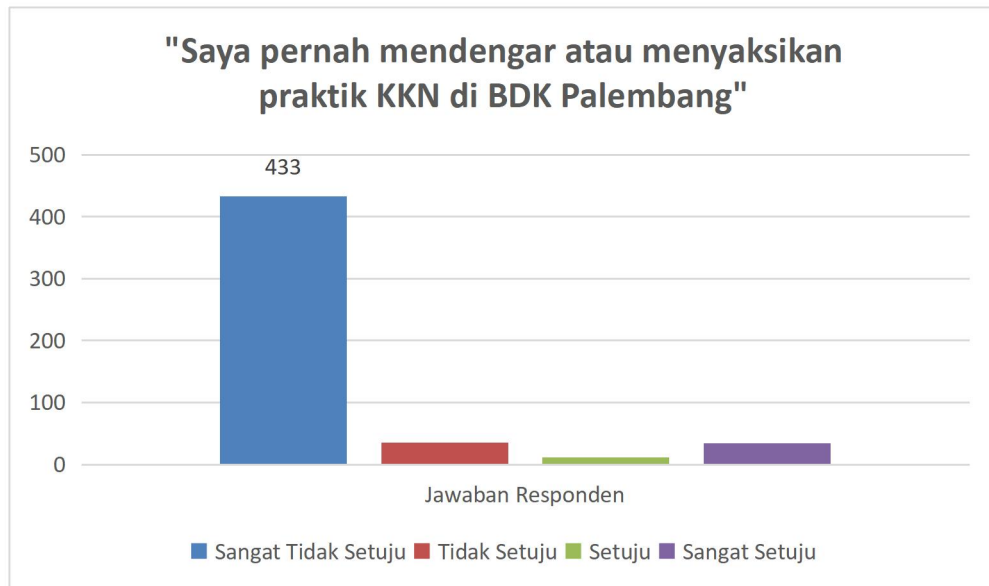


Gambar 3.9. Grafik Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Percaloan

h. Praktik KKN

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **3,69** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Pencaloan.

Detil jawaban responden dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 3.10. Grafik Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Praktik KKN

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Gambaran dan analisis hasil capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh BDK Palembang, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan *stakeholder* BDK Palembang, yaitu pengguna pelatihan BDK Palembang.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi BDK Palembang pada tahun 2024 mencapai nilai 3,68 dari skala 4,00. Hal ini berarti bahwa masyarakat percaya bahwa layanan yang diberikan oleh Palembang telah bersih dari korupsi.
2. Unsur penilaian “Manipulasi Peraturan” merupakan unsur dengan nilai indeks tertinggi, yaitu 3,78. Indeks tersebut menunjukkan jika masyarakat cenderung menilai jika BDK Palembang tidak memanipulasi peraturan dalam pelaksanaan pelatihan.
3. Unsur penilaian “Penyalahgunaan” merupakan unsur dengan nilai persepsi terendah dibandingkan unsur lainnya, yaitu 3,59. Meski begitu, secara umum kinerja unsur ini masuk dalam kategori “bersih dari korupsi”.

4.2. REKOMENDASI

Beberapa hal ini kiranya dapat dilakukan BDK Palembang untuk memperbaiki kinerjanya, sekaligus memperbaiki persepsi pengguna jasa pelatihannya:

1. Setiap panitia pelatihan perlu mengedukasi dan memandu peserta pelatihan dalam pengisian kuesioner SPAK, agar tidak terjadi bias dalam pemilihan jawaban.
2. Kuesioner Google Form perlu diperbaiki dan diperbarui lagi, agar ke depannya setiap pertanyaan dapat merepresentasikan unsur-unsur penilaian IPAK yang lebih luas, serta agar responden mengisi semua unsur penilaian tanpa terkecuali.
3. BDK Palembang perlu lebih aktif dalam mengelola media sosial dan website, terutama dalam mengunggah konten-konten berisi informasi seputar pelatihan.
4. BDK Palembang perlu mengedukasi pegawainya tentang gratifikasi, agar para pegawai tahu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan seandainya mereka memperoleh hadiah atau gratifikasi dari peserta pelatihan.

